

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 KAJIAN TEORI**

##### **2.1.1 Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Dalam artian peran menurut Soekanto (2012 : 212), “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”, sementara itu menurut Abdulsyani (2012 : 94), “Peranan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Definisi dari beberapa ahli tersebut dapat dirumuskan proses keberlangsungan merupakan suatu aktifitas dengan kegiatan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yaitu menyangkut tentang pembelajaran adalah “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Upaya untuk peningkatan pemahaman terhadap materi bahan pembelajaran guru harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kreativitas berpikir dalam menumbuhkan kreativitas kemampuan dalam interpretasi ilmu pengetahuan baru, itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru. Pembentukan sikap untuk peserta didik adalah suatu usaha pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan peserta didik. Interaksi sosial dilingkungan sekolah maupun masyarakat seorang peserta didik harus mendapatkan ilmu melalui proses pembelajaran peserta didik.

Menurut Murdiono (2012 :20) Metode untuk pencapai hasil pembelajaran yang diharapkan maka proses pembelajaran harus tertuju pada kondisi eksternal peserta didik maupun faktor internal peserta didik dalam perkembangan kondisi tersebut guna untuk hasil pencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Menurut Uno (2009:2) Sependapat dengan pemaparan sebelumnya bahwa untuk hasil pembeajaran yang diharapkan dalam mengembangkan metode pembelajaran dengan strategi yang implisit dalam kegiatan memilih serta menetapkan metode menarik dalam bentuk upaya membelajarkan peserta didik.

Menurut Destikasari (2016:10) Dalam mengetahui kejadian kejadian eksternal peserta didik dalam hal terhadap peran rangkaian yang terjadi dalam faktor internal pesert didik, proses pembelajaran harus didasari semua tindakan yang membangun untuk proses pembelajaran peserta didik Gafur (dalam:2012:7) Teori belajar menerapkan pada teori untuk menerapkan cara bagaimana penerapan proses pemebelajaran sesuai dengan teori belajar. Sedangkan menurut Ihsana (2017:1) Proses mengajar untuk menunjukkan perubahan perilakunya dengan mengaggap seseorang sudah melakukan belajar maka harus menerapkan adanya respon stimulus dalam berinteraksi.

Mengenai warga negara hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menjadi warga negara yang berfikir kritis tajam dan mengetahui akan hak dan kewajibanya maka melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk proses membangun hak dan kewajiban warga negara dalam pemikiran yang kritis tajam untuk proses tujuan membangun manusia yang bermartabat menjadi warga negara dunia dengan cerdas kreatif dan berkarakter, maka dalam proses menumbuhkan peserta didik yang mengerti pribadi akan tentang hak dan paham kewajibanya sebagai warga negara Indonesia maka didasari dengan toleransi tinggi, berfikir kritis dalam memilik kepribadian yang akan cinta damai demi terciptanya partisipasi kehidupan politik yang berlaku dalam aspek nasional maupun internasional, dengan mengembangkan peserta didik yang meerapkan pribadi yang peduli memiliki rasa santun, percaya diri untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial, masyarakat maupun sekolah serta kehidupan bernegara dan berbangsa (Supriyanto 2018:116).

3 Indikator yang dimiliki Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu :

#### **2.1.1.1 Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn**

Dalam pencapaian tujuan perencanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan maka proses perencanaan pembelajaran guna untuk

terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka menerapkan proses keperluan kegiatan dalam mencapai tujuan maka dalam proses perencanaan menyusun langkah-langkah yang akan diterapkan berguna untuk menyusun, serta disusun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam keinginan perencanaan. Tjokroamidjojo (Agustrian, 2017:8) Memperjelas untuk. “Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu”. Tujuan pembelajaran yang akan tercapainya peserta didik, paham materi yang harus dipelajari, dan berhubungan dengan materi yang dipelajari dengan keterkaitan materi yang harus dipelajari berikutnya, dan juga berguna dalam dalam kegiatan sehari-hari, harus didasari dengan keahaman peserta didik, maka kompetensi pencapaian pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maka dalam proses perencanaan harus tertuju pada pemahaman materi yang akan disampaikan oleh guru terhadap peserta didik, dan bisa menghasilkan pengelolaan data yang akan diketahui serta dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, sebagian peserta didik mampu menerima dengan menarik dalam penyampaian materi sesuai dengan perencanaan pembelajaran dengan tujuan peningkatan hasil yang dicapai oleh peserta didik, maka tenaga pendidik atau dosen harus menerapkan sesuai dengan perencanaan, sehingga peserta didik akan paham dan meningkatkan pemahaman dengan sering membaca buku, atau dengan sumber lain jurnal maupun internet, maka dengan begitu tenaga pendidik harus memperhatikan demi menunjang peningkatan yang lebih baik.

#### **2.1.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran PPKn**

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun materi pelajaran lain, maka bukan hanya membutuhkan perencanaan saja melainkan perlu adanya strategi dalam pelaksanaan pembelajaran harus menerapkan proses pelaksanaan dengan baik sehingga dapat diterima oleh peserta didik. George R. Terry (1986) dalam Agustrian (2017: 8) menerangkan yaitu. “Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan

sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.” Dengan melalui petunjuk dan motivasi agar berlangsungnya kegiatan secara terbaik dengan tujuan yang telah diharapkan maka pelaksanaan pembelajaran yang efisien dengan menerapkan sistem pembelajaran yang menarik guna untuk mengukur sistem pembelajaran tersebut

### **2.1.1.3 Evaluasi Pembelajaran PKn**

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara terstruktur sistematis yaitu dengan evaluasi pembelajaran adalah suatu bentuk dengan usaha dalam penilaian guna memperoleh informasi sejauh mana peserta didik dalam ukuran materi yang dipahaminya termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Farida (2017:2) “Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan menyeluruh dalam rangka pengendalian penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai dan arti) berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu”. Maka dapat disimpulkan bahwa guru dapat mengukur pencapaian pemahaman materi yang diberikan dapat diukur melalui evaluasi pembelajaran.

### **2.1.2 Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang wajib di sekolah, Pendidikan kewarganegaraan telah berkembang secara cepat guna untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan peserta didik mengalami perkembangan dengan menyesuaikan era perkembangan teknologi, dapat diukur dari dan nampak baik dari dalam substansinya, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan dalam hal sesuai dengan kepentingan negara.

Hakikat Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Secara Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan secara ontologis yaitu menyebutkan sebagai citizen *civic education* dan juga banyak menyebutkan yaitu dengan *democracy education*, yang didasari oleh Undang Undang Republik Indonesia dengan nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, begitu juga surat keputusan direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yaitu tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di

perguruan tinggi, sedangkan hakikat Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan secara Aksiologis menurut keputusan DIRJEN DIKTI NO.43/DIKTI/KEP/2006 Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dapat didefinisikan dengan visi misi dan kompetensi atau manfaat sebagai berikut

Visi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pedoman maupun sumber nilai untuk penyelenggara dan pengembangan mata pelajaran, berguna untuk menumbuhkan peserta didik dalam membentuk kepribadian sebagai manusia berdasarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dalam hal ini bersumber pada realitas yang dihadapi bahwa peserta didik merupakan generasi bangsa yang wajib memiliki visi religius, intelektual, berkeadaban, berkemanusiaan yang adil, dan memiliki sikap nasionalisme cinta tanah air

Bersumber pada kurikulum SMA pada tahun 1962 yang memuat materi terhadap pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K:1962) hal yang menjelaskan mata pelajaran *Civics* (Kewarganegaraan) yang berdasarkan substansi dari pengalaman belajar yang dikembangkan dan diterapkan dari kedisiplinan ilmu sejarah, ekonomi, geografi dan politik, dalam pidato-pidato presiden, serta deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengetahuan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menurut Somantri (1969:7) berpendapat bahwa istilah dari *Civics* tersebut dengan secara resmi tidak ditemui dalam kurikulum tahun 1957 ataupun berdasarkan dalam kurikulum pada tahun 1946. Perlu digaris bawahi bahwa selaku materiil pada kurikulum SMP dan SMA pada tahun 1957 diperoleh mata pelajaran dengan berisikan tata negara dan tatanan hukum, dan pada kurikulum 1946 ditemukanya mata pelajaran berisikan pengetahuan umum yang bersubstansi memasukan ilmu pengetahuan tentang pemerintah

Sesudah itu dari dalam kurikulum pada tahun 1968 serta 1969 arti *Civics* serta Pendidikan Kewarganegaraan Negara diterapkan dengan bertukar-pakai (*interchangeably*). Contoh pada saat kurikulum SD tahun 1968 diterapkan arti Pendidikan Kewarganegaraan yang sering digunakan sebagai nama mata pelajaran, yang memiliki isian tentang sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (dapat diterjemahkan yaitu Pengetahuan Kewargaan Negara), namun didalam kurikulum

1968 tercantumkan mata pelajaran Kewargaan Negara dengan berisikan sejarah Indonesia serta Konstitusi berdasarkan UUD 1945. Namun dalam kurikulum SMA 1968 ditemukan mata pelajaran Kewargaan Negara yang memuat materi, UUD 1945 terutama yang berkenan

Namun didalam Kurikulum SPG 1969 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara dengan berisikan terutama memuat dengan sejarah Indonesia hak asasi manusia,, pengetahuan kemasyarakatan dan konstitusi sedangkan menurut Winaputra & Budimansyah (2012 : 95). Secara umum. Menurut Winataputra & Budimansyah (2012: 1), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, dalam memiliki komitmen dengan kuat untuk mempertahankan kebhinekaan di Indonesia serta mempertahankan integritas nasional itu semua persiapan peserta didik dalam menjadi warga negara yang diharapkan, maka subjek pembelajaran yang memiliki peningkatan misi guna membentuk kepribadian bangsa, yaitu dengan pengupayaan akan sadar dalam "*nation and character building*". maka dengan konteks ini peran PKN diharapkan untuk benegara yang strategis dalam keberlangsungan hidup. Dalam suatu negara apabila dinyatakan negara demokratis yang bersandarkan pada ilmu pengetahuan, kenijakan dari warga negaranya serta ketrampilan dan peran oang orang yang mereka pilih dapat meningkatkan kemajuan ataupun tidak, PKN memiliki tujuan yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang diharapkan yang menerapkan komitmen sangat kuat dalam mempertahankan integritas nsional dan kebhinekaan Indonesia

Sementara pada kurikulum tahun 1975 arti Pendidikan Kewargaan Negara dirombak menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang menerapkan materi Panacasila sebagaimana tidak lepas dari dasar pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4, dengan beberapa berubahannya memenuhi harapan yaitu dengan misi yang berisikan amanat oleh Tap.MPR II/1973. Maka didalam mata pelajaran PMP ini harus diwajibkan untuk SD, SMP, SMA, SPG serta Sekolah Kejuruan

Untuk mempertahankan mata pelajaran PMP maupun isinya dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang didasari oleh penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada saat itu tersusun dengan muatan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945

Dalam proses berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang berisikan tentang sistem Pendidikan Nasional yang mampu menggariskan dengan penerapan muatan kurikulum pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, untuk bahan kajian yang bersifat wajib untuk kurikulum semu jalur, serta memiliki jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan Menengah pada tahun 1994 menyediakan misi baru pendidikan yang harus diterapkan guna untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn

Maka dari itu Kurikulum PPKn 1994 berbeda dengan kurikulum sebelumnya dengan mengatur materi pembelajaran yang bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai p4, namun dari sumber resmi lainnya yang diterapkan dalam menggunakan metode pendekatan spiral sehingga meluas. Menurut Winaputra (2012:96). Maka dalam proses pendekatan mengucapkan sila-sila Pancasila menggunakan jabaran nilai-nilai berguna untuk setiap jenjang pendidikan disetiap catur wulan masing-masing kelas.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. No 20 tahun 2003 dalam proses berlakunya kurikulum yang sering dikenali yaitu dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dengan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan nama menjadi Kewarganegaraan. Pada tahun 2006 namanya mengalami perubahan kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dilihat dari aspek substansi tidak mengalami peningkatan yang berarti, satuan pendidikan berwenang dalam pengembangan kurikulum dikembangkan pada masing-masing oleh lembaga pendidikan

Dalam berbagai perubahan dalam proses peningkatan dalam pengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan telah terjadinya keteraturan dalam kerangka pikir yang sebagaimana dalam penguraian penjelasan diatas, yang serta membawa gambaran keadaan yang merubah terjadinya krisisnya konseptual, yang

membawa dampak pada pengaruh terjadinya krisis operasional yang bersangkutan pada kurikulum.

Maka sebutan Pendidikan Kewarganegaraan dapat tersusun secara konseptual yaitu:

- a) Kewarganegaraan pada tahun 1956
- b) *Civics* pada tahun 1959
- c) Kewarganegaraan pada tahun 1962
- d) Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968
- e) Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1975
- f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan pada tahun 1994
- g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003)

Pendidikan Kewarganegaraan menyusun dengan penggunaan istilah yang sering mengalami perubahan sehingga mengakibatkan sangat jelas ketidak tepatannya. Menurut Kuhn Budimansyah (2012:74) pendidikan kewarganegaraan (PKn) tidak teratur konsep atau nama sebutan dapat dilihat dari krisis yang bersifat konseptual, Krisis operasional sesuatu yang menjadi teladan sehingga dapat mengalami terjadinya rombakan format dan isi buku mata pelajaran, sehingga dalam proses yang tidak artikulatif dan proses kognitif didalam pengamatan fenomena kelas yang belum banyak peningkatan dan penekananan. Maka dalam kedua jenis krisis tersebut terdampak pada kelembagaan sosial politik sehingga sekolah perlu adanya peningkatan tersebut, maka perlu adanya peningkatan dalam efektifan pelaksanaan metode pembelajaran secara terkonsep, dikarenakan belum adanya peningkatan suatu kerangka pikir untuk meningkatkan mutu pendidikan kewarganegaraan dengan secara teratur dapat diterapkan dan bisa diterima secara nasional dijadikan keterangan operasional dan konseptual.

### **2.1.3 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki artian bahwa kata Kewarganegaraan bermula dalam bahasa latin yaitu disebut *Civicus* dan berikutnya, unsur bahasa *Civicus* diartikan dalam bahasa inggris sehingga menjadi kata *Civic* dan memiliki arti yaitu tentang kewarganegaraan atau warga negara, Ilmu kewarganegaraan

diambil dari kata *Civic* bersumber pada kata *civic* yang memiliki artian sebagai ilmu kewarganegaraan, dan ditambah dengan *Civic Education* dapat diartikan pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran kewarganegaraan yang sudah dikenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda dengan sebutan *Burgerkunde*

Dalam artian menurut Kerr Budimansyah, (2007 : 4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut :

*“Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process. Budimansyah, (2007: 4).”*

Dari rumusan pendapat kerr tersebut bisa dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran secara khusus dalam proses persiapan generasi muda penerus bangsa harus bijak dalam mengambil tanggung jawab dan peran sebagai warga negara. Itu sebagai persiapan sebagai pembentukan generasi penerus bangsa

Sedangkan menurut Azis Wahab Cholisin, (2000:18) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan:

*“Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PPKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut”*

Sedangkan pengertian dengan dasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu “Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

Sedangkan menurut Samsuri (2011:28) warga negara yang memiliki kepribadian , kecakapan, ilmu pengetahuan dan nilai nilai yang diterapkan untuk

berpartisipasi dalam lingkungan sosial maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting.

Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) Pendidikan kewarganegaraan merupakan :

“Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat”

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah mata pelajaran dengan tertuju pada proses pembentukan diri yang mempunyai macam macam mulai dari segi agama, sosial, bahasa, suku, ras, budaya demi menjadi warga negara Indonesia yang terampil dan cerdas, mempunyai kaakter yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang tertanamkan rasa nasionalisme yang tangguh dan konsisten demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), itu adalah acuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan Kesimpulan dari pertanyaan para ahli tersebut bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah rangkaian suatu proses bisa dijadikan rangkaian proses mengarahkan peserta didik lebih mengedepankan karakter yang mengedepankan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik mengerti arti pentingnya kehidupan sosial, cerdas, termpil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan penting dalam kemajuan masyarakat sesuai dengan makna Pancasila dan UUD 1945

#### **2.1.4 Tujuan Mata Pelajaran PPKn**

Dasar dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 rumusan pasal 77 J ayat (1) huruf memperjelas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dengan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, nilai moral Pancasila dalam membentuk peserta didik mewujudkan warga negara yang memiliki cinta tanah air, menumbuhkan rasa

kebangsaan dalam konteks nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menciptakan keasadaran berkonstitusi UUD 1945.

Tujuan PPKn dalam Kurikulum 2013 yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu :

- 1) Menerapkan karakter untuk menggambarkan serta menumbuhkan pemahaman, pengalaman batin serta penerapan nilai-nilai dan moral Pancasila dengan cara individu maupun lingkup sosial
- 2) Bersikap positif dalam mempraktikkan keterikatan dengan konstitusional sebagai penunjang dalam bersikap positif dalam memahami sepenuhnya substansi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 3) Memiliki rasa cinta tanah air yang bersumber oleh nilai-nilai Pancasila, dengan pemikiran yang kreatif, inovatif, rasional, dengan pemikiran yang kritis mendalami penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam mewujudkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan serta menerapkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Sepatutnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus berperan dengan aktif, bertanggung jawab dan cerdas demi mewujudkan anggota masyarakat yang sesuai dengan harkat martabat, generasi penerus bangsa dalam anggota masyarakat mewujudkan kerukunan dalam berbagai budaya dan tatanan sosial

#### **2.1.5 Karakteristik Mata Pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013**

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengalami beberapa perubahan nama yang semula mata pelajaran ini bernama Pendidikan Kewarganegaraan dan dirubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

- 2) Menumbuhkan dalam kelajuan pendidikan karakter mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menerapkan misi dalam kebangkitan kekuatan kebangsaan.
- 3) Dalam pengembangan, penanaman, dan penguatan nilai dan moral Pancasila maka dalam pembingkaiian Kompetensi Inti (KI)
- 4) Dalam persyaratan Kurikulum 2013 untuk proses pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pada proses keilmuwan (scientific approach) dalam hal ini mengarahkan untuk peningkatan Kompetensi Inti 1 spiritual, kompetensi inti 2 sikap sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi 4 ketrampilan, mak dalam proses pendekatan mempunyai langkah-langkah kompatibel yaitu :
  - a. Memperhatikan dengan teliti (observing),
  - b. Mengajukan pertanyaan (questioning),
  - c. Menyatukan informasi (exploring),
  - d. Mengasosiasi/Cara berfikir kritis (associating),
  - e. Mampu berkomunikasi dengan baik (communicating).

#### **2.1.6 Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kurikulum 2013**

1. Pandangan hidup bangsa sebagai dasar Negara berdsarkan Ideologi Pancasila
2. Dalam kehidupan bermasyarakat maka landasan dasar hukum adalah Undang Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara
3. Negara Republik Indonesia ialah maka dari iti final kesepakatan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Keberagaman dalam Kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa atas dasar Bhineka Tunggal Ika adalah untuk mewujudkan kesatuan filosofi yang dilandasi warna warni keberagaman bangsa Indonesia.

### 2.1.7 Kedudukan dan Fungsi PPKn dalam Kurikulum 2013

- 1) Sumber bangsa Indonesia memiliki unsur sumber dari segala sumber hukum dengan dasar Pancasila, empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam asas kerokhanian disiplin hukum dalam penerapan Pancasila
- 2) Memelihara budi pekerti serta memegang teguh cita cita moral rakyat yang berbudi luhur, dan merawat budi pekerti (moral) maka Pancasila yang terdapat dalam isinya yaitu norma yang menjadikan penyelenggara Negara dalam memegang cita cita moral bangsa Indonesia
- 3) Moral ataupun karakter Pancasila dalam pengembangan kemampuan psikososial kewarganegaraan Indonesia merupakan tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menerapkan nilai, maka ciri khas tersebut berbeda dengan Civic Education USA, Citizenship education, karena didalam kewarganegaraan Indonesia mengedepankan pembentukan moral maupun karakter sebagai warga negara Indonesia.

### 2.1.8 Pengertian Membangun

Shoemaker menjelaskan membangun adalah perubahan sosial diaman ide-ide baru dapat dipekanalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi lebih yang lebih tinggi melalui modernisasi pada tingkat sistem sosial. Dan juga bisa diartikan suatu jenis perubahan sosial yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan perkapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang terarah.

Adapun ciri-ciri membangun sebagai berikut:

- 1) Membangun merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan dalam proses pembangunan.

- 2) Membangun mengandung makna bahwa pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan yang dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisiatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksi sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan.
- 3) Membangun mengarah pada modernitas . Modernitas dapat diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, yang memiliki arti modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan

### **2.1.9 Pengertian Sikap Sosial**

Sikap sosial memiliki tujuan dalam pendidikan yang tertuju pada konsep afektif dalam pembentukan sikap, objek atau masalah tertentu maka sikap memiliki ciri khas yang dapat menguntungkan maupun tidak menguntungkan maka dari itu sikap berhubungan langsung dengan perasaan seseorang dalam hal positif maupun negatif yang berkenan dengan seseorang, dan apabila tidak kecocokan maka akan menimbulkan masalah tertentu, dan menyentuh perasaan tersebut yang merupakan akibat dari pemikiran seseorang, dalam mempengaruhi karakter atau tingkah laku seseorang maka proses pembentukan sikap diperoleh dengan perkembangan hidup

seseorang dalam mempengaruhi karakter seseorang dengan objeknya dan bisa menimbulkan perbuatan yang khusus, sikap itu sendiri dapat dibedakan yaitu sikap individu dan sikap sosial, kegiatan yang berhubungan dengan objek sosial dan diterapkan dengan kegiatan berulang ulang dan sama maka itu disebut dengan sikap sosial, sedangkan dalam menaruh simpati dengan menimbulkan suka ataupun tidak kesukaan dengan pribadi atas dasar obyek maka itu dapat dikatakan sebagai sikap individu, dalam melibatkan orang lain maupun kelompoknya dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara kegiatan yang sberulang ulang maupun sama dengan dengan objek sosial itu merupakan arti dari sikap sosial, karena sikap sosial tidak dilakukan dengan individu saja melainkan dalam lingkup lingkungan masyarakat.

3 aspek komponen ataupun dasar penguatan sikap yang saling berhubungan Menurut Abu Ahmadi sebagai berikut :

- 1) Aspek Kognitif adalah Informasi dengan berhubungan yang berhubungan dengan objek langsung, bersangkutan dengan keadaan mengenai ilmu pengetahuan, kepercayaan, pemikiran.
- 2) Aspek Afektif adalah Proses dengan menyangkut tidak senang, simpati, perasaan-perasaan tertentu yang tidak senang, kedengkian dalam proses pembentukan sikap yang tertuju dalam dimensi emosional
- 3) Aspek Konatif adalah objek yang bertindak dalam kecenderungan predisposisi yang dilibatkan.

Kesimpulan dari Thomas dalam Abu Ahmadi untuk memperkuat tentang pengertian sikap diatas “Sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial”. Dapat disimpulkan untuk definisi dari sikap menurut para ahli diatas dengan kesimpulan kegiatan kegiatan sosial akan terjadi dengan kesadaran individu dalam menentukan dalam perbuatan nyata.

Definis dari Chaplin dalam Kartini Kartono yaitu *Social attitudes* 1) Dalam bertingkah laku dengan menerapkan cara terhadap orang lain dengan strategi kecenderungan satu predisposisi 2) Berpendapat umum dalam kesatuan 3) Tujuan tujuan pribadi lawan dari tujuan dari sikap yang terarah atau sikap yang terarah pada tujuan tujuan sikap sosial. 4) Satu pemikiran dengan pendapat Sudarsono yang

mendefinisikan social attitudes (sikap sosial) yaitu suatu kelompok didalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan sikap tegas dari seseorang untuk menerapkan perbuatan.

Pendapat Abu Ahmadi yang menjelaskan tentang sikap sosial yaitu perbuatan yang nyata dan dilakukan dalam menentukan kesadaran individu.. Sikap Sosial adalah orang-orang pada kelompok tertentu dapat diperhatikan dan dinyatakan tidak oleh seseorang. Objek merupakan pernyataan berulang-ulang untuk objek sosial dalam kelompok masyarakat. Misalkan perilaku bermasyarakat misal dalam bendera kebangsaan Indonesia. Pada hari besar Nasional Masyarakat selalu menghormati dengan khidmat. Misal contoh lain masyarakat selalu memperingati dalam heleninggalnya pahlawan Indonesia

Maka dapat disimpulkan dari pernyataan definisi beberapa ahli di atas, yaitu bisa didefinisikan dengan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran individu untuk menentukan perbuatan yang lebih nyata dalam bertingkah laku yaitu dengan menerapkan sikap tertentu untuk orang lain dalam meningkatkan sikap sosial dan lebih mementingkan sikap sosial dari pada sikap individu dan lebih menerapkan tujuan-tujuan sosial, tanggung jawab, sikap toleransi, sikap jujur, disiplin, saling menghormati adalah indikator sikap sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **2.1.10 Pembentukan Sikap Sosial**

Sikap sosial merupakan bersifat watak turun-temurun tidak dapat terbentuk dengan cara kebetulan karena sudah menjadi warisan perilaku seseorang, dalam proses terbentuknya suatu sikap dalam lingkungan sosial, masyarakat, sekolah, golongan, norma, agama, adat, istiadat dan kebudayaan keluarga dalam proses terbentuknya sikap banyak dipengaruhi pergaulan lingkungan tersebut, maka perbedaan lingkungan yang bisa diterima dapat dipengaruhi oleh perbedaan watak sikap perilaku antara individu satu dengan lingkungan sosial, interaksi manusia adalah suatu proses dalam penguatan sikap manusia.

Proses pembelajaran, merupakan hal terpenting demi mewujudkan proses penanaman sikap sosial dengan mengamati sikap orang lain demi proses

pembentukan sikap itu merupakan salah satu sumber terpenting yang bisa diterapkan, tingkah laku mereka merupakan sebuah pandangan dalam proses pembentukan ketika berinteraksi sosial dengan orang lain atau pengamatan perilaku, Proses pembentukan sikap maka dalam pembelajaran harus menerapkan sebagai berikut:

- 1) *Classical conditioning* strategi dengan menerapkan stimulus pertama sehingga mengharapkan sebagai kebiasaan sehingga dapat memunculkan banyak stimulus yang lain, dengan harapan stimulus yang diterapkan pertamakali sebagai tanda memunculkan stimulus yang berikutnya
- 2) *Instrumental conditioning* adalah mempertahankan pengamatan yang paling benar dalam proses pelaksanaan pembelajaran.
- 3) *Observational learning* adalah mengobservasi perilaku dan karakter orang lain dengan pemikiran baru melalui langkah-langkah dalam proses pengamatan yang terjadi dengan individu terhadap orang lain itu merupakan strategi pembelajaran dengan melakukan pengamatan dan bersumber pada belajar dari contoh
- 4) Perbandingan sosial yaitu dilakukan dengan proses menentukan pandangan kita untuk mengamati dalam kenyataan sosial salah atau benar melalui proses perbandingan
- 5) Perubahan sikap akan terjadi apabila semakin besar perubahan sikap dengan dapat dipercayai dengan secara umum dapat diminati oleh orang itu, dalam mempertahankan perubahan sikap menjadi hal yang penting dalam perubahan, menimbulkan kebosanan apabila terlalu banyak pengulangan sehingga mengurangi dukungan faktor dalam perubahan sikap.

Maka dengan itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yaitu :

### **2.1.11 Pembentukan dan Perubahan Sikap**

Penerapan stimulus adalah hal terpenting dalam pembentukan sikap. Kebudayaan dan lingkungan sosial (adat istiadat, lingkungan keluarga, lingkungan

masyarakat ras, suku agama) untuk mewujudkan sikap yang dipengaruhi oleh adaptasi lingkungan sosial. Peran terbesar untuk pembentukan sikap kepribadian anak adalah dalam lingkungan keluarga. Pengaruh yang paling dominan sebagai kelompok primer adalah keluarga. Sikap pasti akan mengalami perubahan karena ketergantungan adaptasi anak tersebut juga ada banyak faktor yang mempengaruhi sikap anak akan cepat pengaruh dengan mengikuti adaptasi lingkungan sosial, entah faktor positif maupun negatif yang dapat mudah diterapkan oleh anak tersebut. Perkembangan sikap yang menimbulkan timbal balik dalam perbuatan. Akan tetapi bukan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku anak tersebut. Terkadang orang selalu diam saja dalam hal menampakan diri terkadang, melainkan itu bukan berarti tidak bertindak. Akan tetapi bersikap dengan menampakan bentuknya saja (Abu Ahmadi, 2002: 170-171).

#### **2.1.12 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap**

- 1) Faktor Intern: adalah faktor yang tumbuh dalam kepribadian diri sendiri. Faktor yang berdasarkan daya atau pemilihan hak seseorang dalam mengolah dan menerima yang diperoleh dari pengaruh luar, alasan dan sikap terbentuk dalam diri manusia yang lebih mengutamakan untuk meningkatkan minat perhatiannya dengan cara menyaring pengaruh dari luar tersebut
- 2) Faktor ekstern: adalah faktor yang tumbuh dari luar kepribadian diri, dalam berinteraksi sosial adalah faktor utama yang mempengaruhi misalkan : dalam interaksi sosial dengan orang lain dengan hasil perkembangan nilai kebudayaan dengan menghasilkan sikap yang baik, misalkan melalui media komunikasi yaitu : Internet, media sosial, televisi, buku, koran dan lain lain
- 3) Ciri-ciri dan Fungsi Sikap

Sikap merupakan tingkah laku yang bersumber dari watak kepribadian diri sendiri, akan tetapi faktor internal bukan berarti sikap, karena kejadian kajadian seseorang dalam hubungan bertingkah laku sebagai pengakibatan perasaan yang relevan

Jadi mengenai ciri ciri sikap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pentingnya mempelajari sikap (learnability)  
Sikap merupakan pengukuran hasil belajar. Maka perlu diidentifikasi dengan gagasan psikolog lainnya.
2. Kestabilan harus dimiliki (stability)  
Hal pertama sikap harus dapat dipelajari, maka menghasilkan perubahan yang lebih kuat, dan tetap mantap, dalam pelaksanaan pengalaman
3. Personal-societal significance  
Situasi adalah alat untuk melibatkan interaksi sosial sehingga menghasilkan situasi atau barang yang lebih baik, apabila merasakan barang atau situasi dengan orang lain
4. Berisi cognisi dan affeksi  
Komponen yang lebih faktual adalah sikap yang berisikan informasi terdapat dalam komponen cognisi
5. Approach – avoidance directionality  
Dalam proses membantu dan mendekati harus memiliki sikap yang baik terhadap setiap interaksinya, maka akan timbul balik apabila seseorang menumbuhkan sikap yang tidak baik maka mereka harus menghindarinya

a) Fungsi Sikap

Ada empat kelompok yang terdapat dalam fungsi sikap yaitu:

- 1) Sikap berfungsi untuk menjalankan penyesuaian diri. Sifat mudah ditularkan adalah karakteristik dari sikap , dalam artian sikap yang mudah penularanya, sehingga mengakibatkan mudah untuk penularan dalam berinteraksi sosial
- 2) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. Kita tahu bahwa tingkah laku anak kecil dan binatang pada umumnya merupakan aksi-aksi yang spontan terhadap sekitarnya. Antara perangsang dan reaksi tak ada pertimbangan, tetapi pada anak

dewasa dan yang sudah lanjut usianya perangsang itu pada umumnya tidak diberi reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat adanya proses secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang itu

- 3) Sikap memiliki peran penting guna untuk pengendalian pengalaman yang telah dialami. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar itu tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani.
- 4) Sikap merupakan kegunaan dalam pernyataan kepribadian, sikap adalah usaha bentuk menggambarkan pribadi seseorang, maka faktor penyebabnya tidak lain dari kepribadian yang mendukungnya.

## 2.2 Kajian Penelitian Relevan

Sebagai bahan kajian penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan

1. Rosidah (2019) dalam penelitian ini berjudul “Strategi Pembelajaran Dalam Menanamkan Sikap Sosial Siswa Di Kelas V MIN Bandar Lampung”. Hasil penelitian yang dilakukan Rosidah yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dalam menanamkan sikap sosial siswa kelas V melalui kegiatan pembelajaran di MIN 2 Bandar Lampung adalah dengan kerja kelompok, keteladanan, pembiasaan, dan pemberian sanksi atau hukuman. Kemampuan guru memberikan contoh sikap interaksi yang baik kepada siswa dan memberikan kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai sikap sosial saat pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi guru dalam menanamkan sikap sosial siswa kelas V MIN 2 adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sikap sosial siswa kelas V yang tampak adalah Percaya diri, Disiplin

diri dan Tanggung jawab. Sedangkan yang kurang tampak adalah Sub. Indikator dari Disiplin diri yaitu melaksanakan kewajiban piket kelas.

2. Wardatul Hidayati (2018) dalam penelitian ini berjudul “Peran Guru Dalam Mengembangkan Sikap Sosial Siswa Pada Pembelajaran Tematik Di Kelas 2B MIN 2 Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Hidayati yaitu Bahwa guru menjalankan perannya pada pembelajaran tematik sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, komunikator, motivator, inspirator, pendidik dan evaluator. Sebagai demonstrator, menunjukkan cara berpakaian rapi, sopan dan islami, berbicara dengan baik, menjawab salam, membimbing siswa untuk berdoa, serta menunjukkan cara agar setiap materi yang diajarkan dapat dipahami siswa. Sebagai pengelola kelas, guru tematik mengatur tempat duduk siswa, mengatur jadwal siswa dalam memimpin doa, melibatkan siswa dalam kegiatan kebersihan atau piket kelas. Sebagai mediator, guru tematik menyediakan dan melibatkan siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru tematik memfasilitasi kebutuhan siswa dan tidak bertindak sewenang-wenang. Sebagai komunikator, guru tematik memberikan informasi yang memunculkan rasa keingintahuan siswa. Sebagai motivator, guru tematik memberi pujian dan mendorong siswa untuk berani tampil di depan kelas, memotivasi siswa untuk membantu teman yang kesulitan sehingga mengembangkan sikap peduli siswa. Sebagai inspirator, guru tematik memberikan kisah inspiratif. Sebagai pendidik, guru tematik menasihati siswa. Sebagai evaluator, guru tematik melakukan penilaian tes dan non tes sehingga. Adapun sikap sosial yang dikembangkan di MIN 2 Kota Tangerang Selatan yaitu: jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, santun, dan peduli.

